

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 2007. *Ungkapan Nilai Budaya Spiritual Memayu Hayuning Bawono dalam Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yogyakarta*. Yogyakarta: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamengku Buwono IX, Sri Sultan. *Tahta untuk Rakyat*. Edisi Terbaru. Jakarta: Gramedia.
- Irianto, Sulistyowati. 2009. *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global dalam Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moertono, Soemarsaid. 2009. *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Ithaca: Cornell University Press.
- Murniatmo, Gatut., Wiwohol, Murianto., Krisnanto., Poliman, & Suhatno. 1989. *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Terjemahan Koesoemanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Edisi Klasik. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Woodward, Mark R. 2011. *Java, Indonesia and Islam*. Dordrecht: Springer

Jurnal

- Astomo, Putera. 2014. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 3 (3).
- Atiq, Dwi Sakiya. 2016. "Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivis PWNU Yogyakarta Dan Aktivis PWM Yogyakarta (Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar Khalifatullah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4 (1).
- Bachtiar, B. 2018. "Problematisasi Yuridis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7 (1).
- Bhumi. "Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Pasca UU No. 13 Tahun 2012." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Dwiyanis, Shenita, dan Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. 2019. "Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta sebagai Daerah Otonomi Khusus." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2): 230–231.
- Hadi, Syofyan. 2018. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (26).
- Hardiyanti, Marzellina, dan Sugiyanto. 2023. "Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic." *Progressive Law and Society* 1 (1).
- Kariem, Muhammad Quranul. 2018. "Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 6 (2).
- Kurniawan, Joeni Arianto. 2018. "Pelajaran dari Konflik Antara Komunitas Sedulur Sikep dan Industri Semen di Jawa Tengah." *Mimbar Hukum* 30 (3).
- Laksono, Fajar. 2011. "Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 8 (6).
- Putra, Gratianus Prikasetya, Sulistyowati Irianto, dan E. Fernando M. Manullang. 2023. "Legal Pluralism in the Special District Province of Yogyakarta, Indonesia." *International Journal of Asia Pacific Studies* 19 (1).

- Riwanto, Agus. 2018. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Konstitusi* 15 (1).
- Setiawan, Hendra, dkk. 2025. "Kajian Pemikiran Realisme Hukum Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank dalam Konteks Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6 (2).
- Suharyo, S. 2016. "Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5 (2).
- Utama, Tody Sasmita Jiwa. 2021. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4 (1).
- Al-Fatih, Sholahuddin, dan Mujibur Rahman Khairul Muluk. 2023. "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4 (2): 87-95.
- Bhumi. 2016. "Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Badan Hukum Warisan Budaya." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2 (1).
- Choiriyati, Wahyuni. 2017. "Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta dalam Dualitas Struktur." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15 (1): 73–84.
- Friedman, Lawrence M. 1980. "The Concept of Legal Pluralism." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 12 (1): 1–10.
- Ghozali, Imawan, & Zamzami. 2024. "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia." *Journal Mas Mansyur* 2 (1).
- Griffiths, John. 1986. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18 (24): 1-55.
- Gunarto, Wempi. 2019. "Online Mass Media as Arena of Sultanah Discourse." *KnE Social Sciences* 3 (20): 438–453.
- Huda, Ni'matul. 2013. "Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 10 (1): 75-98.

- Kurniadi, Bayu Dardias. 2016. "Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit Dan Kekuatan Regim Sultan Hemengkubuwono X." *Masyarakat Indonesia* 42 (1): 31-49.
- Kurniawan, Mahendra Putra. 2015. "Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja." *Jurnal In Right* 5 (1).
- Moore, Sally Falk. 1973. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law and Society Review* 7 (4): 719-746.
- Pawana, Sekhar Chandra. 2020. "Titah Raja Kasultanan Yogyakarta dalam Perspektif Teori Beslissingsleer Ter Haar." *Justitia et Pax, Journal of Law* 36 (1).
- Pradhani, Sartika Intaning, dan Alam Surya Anggara. 2020. "Kedudukan Laki-laki Dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 2 (3): 148-159.
- Purnomo, Eko Priyo. 2018. "Perubahan Pangeran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif 'Aqd al-Imāmah al-Māwardī." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12 (2).
- Purnomo, Heru. 2022. "Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualaman." *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana* 1 (1): 71-92.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. "Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*.
- Rahim, Muhammad Abdul. 2016. "Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6 (1).
- Rizani, Raisa. 2022. "Sabdatama dan Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Perspektif Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Lex Renaissance* 7 (2): 1-20.
- Rosyid, M. Ali. "Konstitusionalitas Keistimewaan DIY dan Problem Suksesi Kepemimpinan Yogyakarta." *Jurnal Konstitusi* 14 (1).
- Safitri, Ilmiawati. 2019. "Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana 'Raja Perempuan.'" *Indonesian Historical Studies* 3 (1): 44-57.

- Setiawati, Nur Aini. 2021. "Land Regulations in the Yogyakarta Sultanate Rijksblad In the Second Decade of the 20 Century." *Paramita: Historical Studies Journal* 31 (1): 83.
- Silalahi, Yohan. 2024. "Implementasi Paugeran sebagai Hukum Adat dalam Hukum Tata Negara." *Dharmasisya* 4 (1): 25-26.
- Sumiyardana, Kustri. 2014. "Transformasi Tajussalatin dari Versi Melayu ke dalam Versi Jawa: Perubahan dalam Pengutipan Ayat-ayat Al-Quran." *Jurnal PENAMAS* 27 (2): 149–158.
- Thontowi, Jawahir. 2013. "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (1): 21-36.
- Wibowo, Riza Satria. 2024. "Hukum Agraria Kasultanan: Perbandingan Rijksblad dan UUPA." *International Journal of Social Science, Humanitas, and Research* 10 (3).
- Wahyuni, Choiriyati. 2022. "Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivis PWNu Yogyakarta dan Aktivis PWM Yogyakarta." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 10 (2).

Hasil Penelitian/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Arif, Muhammad Zaenul. 2018. "Perubahan Paugeran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif 'Aqd al-Imamah al-Mawardi." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Beni, Rozi. 2023. "Peraturan Kraton Yogyakarta Yang Tak Lagi Jadul (Suatu Analisis terhadap Pembaharuan Teknik, Format dan Muatan Dawuh Dalem di Kraton Yogyakarta)." *Makalah/Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maziyah, Siti. "Islamisasi di Keraton Surakarta 1788–1820 (Pemikiran Pakubuwana IV tentang Politik Islam)." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nisvi, Dwi Sakiya. Kepemimpinan Politik Perempuan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016). *TESIS*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.
- Setyowati, Bernadetha Yessi. 2015. "Citra Keraton Yogyakarta Pasca Sabda Raja di Harian Tribun Jogja." *Skripsi/Artikel Ilmiah*.
- Simarmata, Rikardo. 2013. "Pluralisme Hukum dan Isu-isu Yang

Menyertainya." *Makalah/Working Paper*.

Surahman, Sigit. 2023. "Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mantkubumi Sebagai Sukei Takhta Raja: Studi Power Authority Legitimacy Max Weber." *Disertasi Doktor*, Universitas Sahid Jakarta.

Triwahyuningsih. 2020. "Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya terhadap Keistimewaan DIY." *Disertasi Doktor*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

DetikNews. 2015. "Keluarkan Sabda Raja: Sultan HB X Lepas Gelar Khalifatullah." Diakses dari detik.com (1 Mei 2015).

JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta. "Apa beda Peraturan dengan Keputusan?".

Diakses 5 November 2025.

Neliti. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum". Diakses 5 November 2025.

NU Online. 2015. "Gelar Sultan Itu Fondasi Keraton Kasultanan Mataram Islam." (Ditulis oleh Patoni, Editor: Alhafiz Kurniawan).

Tribun Jogja. 2021. "Ini Penjelasan Sri Sultan Hamengku Buwono X Soal Pencopotan GBPH Prabokusumo dan GBPH Yudhaningrat."

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.